

Pengaruh kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja

lin Nuraeni, Yulinda Devi Pramita*, Naufal Afif

Akuntansi, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: yulinda@unimma.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.11050

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of financial quality, utilization of information technology, internal control and reporting systems on the performance accountability of the government of Magelang Regency. The research population is OPD in Magelang Regency. This research was conducted in 24 OPD. The research sample is 75 respondents, obtained by purposive sampling technique. The research uses primary data in the form of answers from research questionnaires obtained from respondents who are the research sample. The analysis technique used in this study is data analysis using descriptive statistical tests, data quality tests consisting of validity and reliability tests and hypothesis testing using multiple linear regression analysis. From the results of data analysis, it can be concluded that internal control and the reporting system have a significant positive effect on performance accountability, while the quality of financial reports and the use of information technology have no effect on performance accountability.

Keywords: *Quality of Financial Reports; Use of Information Technology; Internal Control; Reporting Systems; Performance Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang. Populasi penelitian adalah OPD dilingkup Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan di 24 OPD. Sampel penelitian berjumlah 75 responden, diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian menggunakan data primer berupa jawaban dari kuisioner penelitian yang diperoleh dari responden yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Pengendalian Internal; Sistem Pelaporan; Akuntabilitas Kinerja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program (Permadi, 2019). Kinerja pemerintah disusun berdasarkan beberapa tahap yaitu perjanjian kinerja, pengurangan kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja (Mawarni, 2015).

Laporan pertanggungjawaban yang harus disiapkan ditujukan untuk menunjukkan tingkatan kinerja (Savila, 2021). Pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya adalah keuangan, sehingga keberhasilan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam membangun negara sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Wiguna et al., 2021).

Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus mengupayakan kesinambungan dalam merencanakan program dan kegiatan, mengelola anggaran yang selaras serta tepat sasaran. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan secara optimal. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Opini BPK Se-Kedu

No	Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kabupaten Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Kebumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kabupaten Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel opini BPK Se-Kedu 2017-2021 menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten di Jawa Tengah memperoleh predikat WTP. Khususnya di Kabupaten Magelang terlihat bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi, pada tahun 2020 muncul kasus korupsi pembelian bahan bakar minyak (BBM) operasional truk pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp165.331.213 dari anggaran BBM tahun 2020 (Rakaitadewa, 2023). Pada kasus ini, kepala UPTD pengelolaan sampah dan Kasubag TU dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Permasalahan kelemahan pengendalian internal yang masih ditemukan di IHPS II 2021 ini juga menyebabkan kerugian yang cukup besar, yakni 1,118 (18%) kasus permasalahan sistem pengendalian internal dan 1.720 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun. Fenomena ini menggambarkan kurangnya akuntabilitas kinerja pada OPD Kabupaten Magelang yang akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Magelang.

Kualitas laporan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan akuntabilitas kinerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan

dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Namun, terdapat beberapa pendapat mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja (Fitriyani & Herawati, 2019; Ridzal, 2020), sementara penelitian lain menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Reyhan, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang menunjang pada era globalisasi ini dengan adanya pengembangan pada teknologi pekerja juga akan semakin mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses pengerjaan menjadi lebih efektif serta efisien serta dapat menghemat waktu, sehingga pekerja tidak kualahan dalam menyusun laporan keuangan. Adanya kemajuan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, khususnya AKIP, mendorong penyusunan laporan yang bersifat *paperless*, yang dapat menghemat waktu dan uang. Penyelenggaraan pemerintahan harus bersih, efektif, transparan, dan akuntabel agar sistem *e-government* seperti Perpres/No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berfungsi dengan baik (Shafira et al., 2023). Terdapat perbedaan temuan dalam penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Amran (2020) dan Julia (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Sedangkan penelitian Mubaraq (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan temuan dalam penelitian terkait pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Amran (2020), Aprilianti et al. (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ratnadi (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Sistem pelaporan berdasarkan peraturan negara Nomor 53 tahun 2014) tentang petunjuk teknis pendayagunaan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah menyebutkan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Perbedaan temuan Andriani & Wati (2021) dan Rahman & Yusuf (2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pada penelitian (Mikoshi, 2020) sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat inkonsisten dalam penelitian yaitu masih terdapat hasil yang berbeda antara penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Ridzal (2020), Fitriyani & Herawati (2019), Reyhan (2017), Amran (2020), Julia (2020), Mubaraq (2017), Dewi & Ratnadi (2017), Rahman & Yusuf (2021) dan Mikoshi (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 1) penelitian ini difokuskan pada OPD Kabupaten Magelang, 2) menambah variabel kualitas laporan keuangan dan sistem pelaporan sebagai variabel independen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, serta memberikan saran kepada pegawai dari pihak terkait dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

2. Metode

Populasi adalah wilayah generasional yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Ghozali, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural dan aparat yang memiliki peran dalam penyusunan anggaran pada setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di 24 OPD, sampel pada penelitian ini yaitu 4 pegawai setiap OPD. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Indikator variabel penelitian diukur menggunakan skala likert 5 yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pengujian untuk analisis data yang dilakukan terdiri dari uji deskriptif, uji kualitas, uji determinasi, uji F dan uji t.

2.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, untuk menguji hipotesis yang berupa pengaruh antar variabel. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada pegawai OPD Kabupaten Magelang.

2.2. Teknik pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah survey, metode ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisikan daftar pernyataan yang terstruktur kepada responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2.3. Variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Sementara, variabel dependennya adalah akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Hasil penelitian

a. Demografi responden

Demografi responden disajikan pada [Tabel 2](#). Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja.

Tabel 2. Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Jenis kelamin	Pria	23	30,66%
	Wanita	52	69,33%
	Total	75	100%

Umur	21-30 Tahun	18	24%
	31-40 Tahun	11	14,6%
	41-50 Tahun	30	40%
	51-60 Tahun	16	21,3%
	Total	75	100%
Tingkat pendidikan	SMA	7	9,3%
	D3	13	17,3%
	S1	47	62,6%
	S2	8	10,6%
	Total	75	100%
Jabatan	Kepala bagian keuangan	13	17,3%
	Bendahara	14	18,6
	Staf keuangan	48	64%
	Total	75	100%
Masa kerja	1-5 tahun	21	28%
	6-10 tahun	2	2,6%
	>10 tahun	52	69,3%
Total	75	100%	

Berdasarkan [Tabel 2](#), bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah perempuan (52%). Responden mayoritas dalam kelompok usia antara 41-50 tahun (40%). Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan S1 (62,6%) dan telah bekerja selama lebih dari 10 tahun (69,3%).

b. Statistik deskriptif

Pengolahan data menunjukkan hasil statistik deskriptif yang meliputi informasi mengenai jumlah data yang diuji, nilai minimum, maksimum, *mean* dan *standar deviasi* seperti ditunjukkan pada [Tabel 3](#).

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
AK	75	3	5	4,17	0,380
KLK	75	4	5	4,23	0,352
PTI	75	4	5	4,38	0,408
PI	75	3	5	4,13	0,388
SP	75	3	5	3,99	0,380

Berdasarkan hasil uji statistik pada [Tabel 3](#) dapat dijelaskan bahwa jawaban rata-rata responden terkait variabel akuntabilitas kinerja, kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem pelaporan, masing-masing mendekati nilai maksimum sehingga dapat dinyatakan bahwa responden setuju dengan pernyataan yang diajukan pada kuesioner.

c. Uji kualitas data

1. Uji validitas

Hasil uji validitas pada variabel akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan sistem pelaporan menunjukkan bahwa terdapat 6 pernyataan yang memiliki nilai *cross loading* < 0,05. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah KLK4, KLK7, KLK8,

KLK9, KLK10 dan SP6, yang kemudian dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan pengujian validitas data kembali dengan menghilangkan data yang tidak valid dengan hasil pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Cross Loading

Butir Pernyataan	Variabel					Keterangan
	AK	KLK	PTI	PI	SP	
AK1	0,835					Valid
AK2	0,658					Valid
AK3	0,776					Valid
AK4	0,676					Valid
AK5	0,848					Valid
AK6	0,739					Valid
AK7	0,814					Valid
AK8	0,815					Valid
AK9	0,705					Valid
AK10	0,778					Valid
KLK1		0,701				Valid
KLK2		0,864				Valid
KLK3		0,831				Valid
KLK5		0,803				Valid
KLK6		0,796				Valid
PTI1			0,566			Valid
PTI2			0,769			Valid
PTI3			0,791			Valid
PTI4			0,866			Valid
PTI5			0,878			Valid
PI1				0,640		Valid
PI2				0,771		Valid
PI3				0,755		Valid
PI4				0,724		Valid
PI5				0,767		Valid
SP1					0,862	Valid
SP2					0,844	Valid
SP3					0,633	Valid
SP4					0,844	Valid
SP5					0,702	Valid

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada [Tabel 5](#), nilai *cronbach alpha* > 0,70. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan dalam kuesioner yang digunakan reliabel, sehingga memenuhi uji kualitas data dalam pengukuran variabel tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas laporan keuangan	0,850	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0,830	Reliabel
Pengendalian internal	0,782	Reliabel

Sistem pelaporan	0,831	Reliabel
Akuntabilitas kinerja	0,920	Reliabel

d. Uji koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 6, menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,632. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan sistem pelaporan mampu menjelaskan sebesar 63,2% variasi dalam akuntabilitas kinerja. Sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,808	0,652	0,632	0,232

e. Uji F

Berdasarkan hasil uji F, nilai *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitung sebesar $32,360 >$ dari F tabel 2,503. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian ini dapat layak atau *fit*.

f. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t. Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada Tabel 7. Berdasarkan hasil pengujian kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,103 < t_{tabel} = 1,666$ dan $p\ value = 0,918 > \alpha = 0,050$. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, maka H1 tidak diterima. Kemudian, pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi nilai t_{hitung} sebesar $-0,032 < t_{tabel} 1,666$ dan $p\ value = 0,975 > \alpha = 0,050$. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga H2 tidak diterima.

Pada pengujian hipotesis ketiga terkait pengendalian internal, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $3,246 > t_{tabel} 1,666$ dan $p\ value 0,002 < \alpha = 0,050$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga H3 diterima. Sementara, hasil pengujian pada variabel sistem pelaporan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $6,730 < 1,666$ dan $p\ value = 0,000 < \alpha = 0,050$. Artinya, sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga H4 diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Keterangan	Beta	t	Sig	Kesimpulan
Kualitas laporan keuangan	-0,011	-0,103	0,918	H1 tidak diterima
Pemanfaatan teknologi informasi	-0,003	-0,032	0,975	H2 tidak diterima
Pengendalian internal	0,289	3,246	0,002	H3 diterima
Sistem pelaporan	0,592	6,730	0,000	H4 diterima

3.2 Pembahasan

a. Kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja melibatkan tanggung jawab dalam mencapai

tujuan dan mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai. Pengukuran akuntabilitas kinerja tidak hanya menggunakan laporan keuangan, namun juga aspek non-keuangan.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori *stewardship* yaitu kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [Reyhan \(2017\)](#), bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kualitas laporan keuangan yang tinggi, hanya memberikan gambaran terbatas tentang kinerja pemerintah dan tidak secara langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja dalam aspek non-keuangan. Namun, temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian [Ridzal \(2020\)](#) dan [Fitriyani & Herawati \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

b. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi hanya sebagian kecil dari indikator kinerja yang diukur, sehingga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi telah mengadopsi teknologi informasi dalam operasional dan manajemen, tidak secara langsung mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja yang diharapkan. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk bertanggung jawab atas pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya dan transparansi dalam pelaporan hasil kinerja kepada pemangku kepentingan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah tidak berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitasnya. Implementasi teknologi informasi yang baik bukanlah satu-satunya faktor yang menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan [Mubaraq \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan [Amran \(2020\)](#) dan [Julia \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

c. Pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka semakin baik pula akuntabilitas kinerjanya. Pelatihan terhadap pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar serta menghindari risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah dalam kaitannya untuk mewujudkan kewajibannya, akan memberikan atau melaporkan seluruh aktivitas keuangannya sebagai wujud dari akuntabilitas.

Hasil ini konsisten dengan penelitian [Amran \(2020\)](#), [Aprilianti et al. \(2020\)](#) dan [Julia \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Dewi & Ratnadi \(2017\)](#) yang

menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

d. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan maka semakin baik pula akuntabilitas kerjanya. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk mengamati dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, bahwa pemerintah dalam pelaporannya harus jujur, objektif dan transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adanya sistem pelaporan yang baik maka akuntabilitas kinerja akan mengikutinya. Hasil ini konsisten dengan penelitian [Adrian et al. \(2020\)](#) dan [Rahman & Yusuf \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian [Mikoshi \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Variabel kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dapat menjelaskan akuntabilitas kinerja sebesar 63,2% sedangkan sisanya 36,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar model pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pengendalian internal dan sistem pelaporan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Implikasi penelitian secara teoritis adalah menambah referensi ilmu pengetahuan pada bidang penatausahaan keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Implikasi praktis penelitian ini pada OPD adalah pentingnya penerapan pengendalian internal dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Referensi

- Adrian, A., Ahmad, I. H., & Maedina, R. (2020). Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja kantor inspektorat Kabupaten Bantaeng. *ACCOUNTING JOURNAL*, 1(3), 238–245.
- Amran, A. (2020). Pengaruh pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

- kinerja instansi pemerintah: pada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1).
- Andriani, G. A. A., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 418–436.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Dewi, K. Y. K., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan integritas pada kecenderungan kecurangan akuntansi satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 917–941.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19–35.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1470.
- Julia, I. A. (2020). *Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya.
- Mawarni, S. (2015). Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Non-Finansial Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian, Job Tension Sebagai Faktor Pemoderasi. *Akuntabilitas*, 8(2), 97–110.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192–199.
- Mubaraq, H. (2017). Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Permadi, E. A. (2019). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN AUDIT KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BANTEN PERIODE 2013–2017*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Rakaitadewa, B. (2023). *Kejari Magelang usut korupsi infrastruktur di Taman Kyai Langgeng*. Suaramerdeka.Com. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/219585253/kejari-magelang-usut-korupsi-infrastruktur-di-taman-kyai-langgeng>

- Reyhan, M. H. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara)*. Universitas Sumatera Utara.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97.
- Savila, L. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (studi empiris pada opd tahun 2016 di kab. bengkalis)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Shafira, A. N., Rudiana, R., & Akbar, I. (2023). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA SITUS WEB “PERMEN MANIS” DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1), 130–143.
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 106–125.
-